



RENCANA AKSI TAHUNAN

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026

**TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)**

Sekretariat : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Poso, Jl. P. Kalimantan No. 14 Poso

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan pimpinanNya sehingga Pelaksanaan Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026.

Rencana Aksi ini disusun penjabaran program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Poso yang dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso.

Selain itu laporan ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso serta rekomendasi pelaksanaan kegiatan. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso masih memerlukan peran dari seluruh stakeholder agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan semakin baik dari waktu ke waktu.

Poso, 31 Januari 2025

Kepala BAPELITBANGDA Kab. Poso

Selaku Sekretaris TKPKD Kabupaten Poso



REZA A. M. RANGGA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770426 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KONDISI UMUM DAERAH.....	7
2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Poso	7
2.2 Geografis	8
2.3 Demografi.....	9
2.4 Pemerintahan	11
2.5 Perekonomian	12
2.6 Sosial Budaya	14
2.7 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Poso.....	14
BAB III HASIL EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025	17
3.1 Evaluasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah	17
3.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	19
BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026	22
4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan.....	22
4.2 Anggaran Penaggulangan Kemiskinan	22
BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026.....	25
5.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026	25
5.2 Permasalahan Kemiskinan	25
5.2.1 Sebaran Penduduk Berpenghasilan Rendah	26
5.2.2 Permasalahan Kemiskinan Sektor Pendidikan	28
5.2.3 Permasalahan Kemiskinan Sektor Kesehatan	29
5.2.4 Permasalahan Kemiskinan Sektor Ketenagakerjaan	31
5.2.5 Permasalahan Kemiskinan Sektor Infrastruktur.....	32
5.3 Program Prioritas.....	33
5.4 Sasaran Pelaksanaan Program	34
5.4.1 Sasaran Prioritas Akses Air Minum Layak.....	34
5.4.2 Sasaran Prioritas Akses Sanitasi Layak.....	36
5.4.3 Sasaran Prioritas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	38
5.4.4 Sasaran Prioritas Akses Penerangan	39
BAB VI PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN POSO MENURUT KECAMATAN, 2024	10
TABEL 2 PDRB KABUPATEN POSO MENURUT PENGELUARAN (ADHB) 2020–2024	12
TABEL 3 PERKEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN	13
TABEL 4 KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN POSO	14
TABEL 5 ANGGARAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026	22
TABEL 6 SASARAN PRIORITAS AKSES AIR MINUM LAYAK.....	34
TABEL 7 SASARAN PRIORITAS AKSES SANITASI LAYAK.....	36
TABEL 8 SASARAN PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)	38
TABEL 9 SASARAN PRIORITAS AKSES PENERANGAN.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Poso	9
Gambar 2 Sebaran Penduduk Berpenghasilan Rendah (DTSEN)	27

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan sudah muncul sejak manusia dilahirkan di dunia, dan sampai sekarang kemiskinan masih terus mengemuka, terutama pada negara berkembang. Permasalahan kemiskinan di negara maju relatif kecil jumlahnya, sehingga dapat lebih mudah untuk diatasi dibandingkan dengan kemiskinan di negara berkembang.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya yang membelenggu seseorang sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan sejatinya dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif.

Prinsip tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,




pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan tugas, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.

Selanjutnya TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
2. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pelaksanaan tugas penanggulangan kemiskinan di daerah, Kepala Daerah membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dan Kab/Kota. Tata kerja



dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, yang dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.


Atas landasan hukum penyelenggaraan tersebut, disusunlah Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2026 (RAT 2026). Penekan rencana aksi, tetap menekankan adanya kolaborasi antar-pemangku kepentingan yang diarahkan memperkuat partisipasi penduduk dalam keseluruhan proses pembangunan. Pembangunan yang tidak hanya diartikan sebatas pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam konteks pertumbuhan kesejahteraan setiap individu.

Sehingga RAT 2026 ini perlu mendapat perhatian bagi pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, yakni penajaman aspek sasaran, program dan sinergi program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2026 (RAT 2026) terkait dengan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan secara umum, sebagai berikut:

1. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.



Selain itu, manfaat dari tersusunya RAT 2026 akan diketahui prioritas program penanggulangan kemiskinan daerah dalam tahun berjalan dan tahun mendatang, dengan memuat informasi:

1. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
2. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
3. matriks target keberhasilan; dan
4. lokasi prioritas program.

Penyusunan RAT 2026 juga mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2023 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

- 
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

- 
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 4);
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2026 (RAT 2026) disusun sebagai penjabaran prioritas program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

BAB III HASIL EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023

BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Poso

Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayahnya sebesar 61.841 Km² terdapat 12,81 persen merupakan luas wilayah Kabupaten Poso yang merupakan satu diantara 13 kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso awalnya berada di bawah kekuasaan pemerintah Raja-Raja yaitu: Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una dan Raja Bungku, yang tidak berkorelasi antara satu sama lainnya.

Meskipun demikian terdapat tiga kerajaan yang sangat mempengaruhi keenam wilayah kerajaan tersebut yaitu:

1. Wilayah bagian selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo,
2. Wilayah bagian utara tunduk pada pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (saat itu masih menyatu dengan Kabupaten Donggala), dan
3. Khusus wilayah bagian timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Struktur pemerintahan Kabupaten Poso sejak dalam kekuasaan Belanda tahun 1905 sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1952 Tentang Pembentukan Daerah Otonom mengalami beberapa kali perubahan. Daerah Sulawesi Tengah berubah menjadi :

1. Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan Ibukotanya Poso.
2. Daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi dan Tolitoli dengan Ibukotanya Palu.

Kemudian berkat perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y. Binol, sampai pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Daerah

Otonom Poso dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso dan Kabupaten Luwuk Banggai dengan ibukotanya Luwuk.

Setelah konflik tahun 1999 terjadi penataan dan perluasan kembali wilayah Kabupaten Poso menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso, dan Kabupaten Morowali dengan ibukotanya Kolonedale. Seiring dengan perkembangan waktu di tahun 2004 terjadi pemekaran kembali, bertambah Kabupaten Tojo Unauna dengan ibukotanya Ampana, selanjutnya pada tanggal 12 April 2013 Kabupaten Poso melahirkan lagi Kabupaten Morowali Utara dengan ibukotanya Kolonedale, sekaligus ibukota Kabupaten Morowali dari Kolonodale berubah menjadi Bungku, sehingga dalam kurun waktu tersebut Kabupaten Poso telah melahirkan 4 (empat) kabupaten baru.

Pejabat Bupati Kepala Daerah yang pernah memerintah di Kabupaten Poso sejak terbentuknya Daerah Otonom tahun 1948 silih berganti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dimulai dari Rajawali Pusadan sebagai Ketua Dewan Raja-Raja di Sulawesi Tengah (1948 - 1952), dan sejak tahun 2021 sampai saat dipimpin oleh dr. Verna G. M. Inkiriwang sebagai Bupati dan H. Soeharto Kandar sebagai Wakil Bupati.

2.2 Geografis

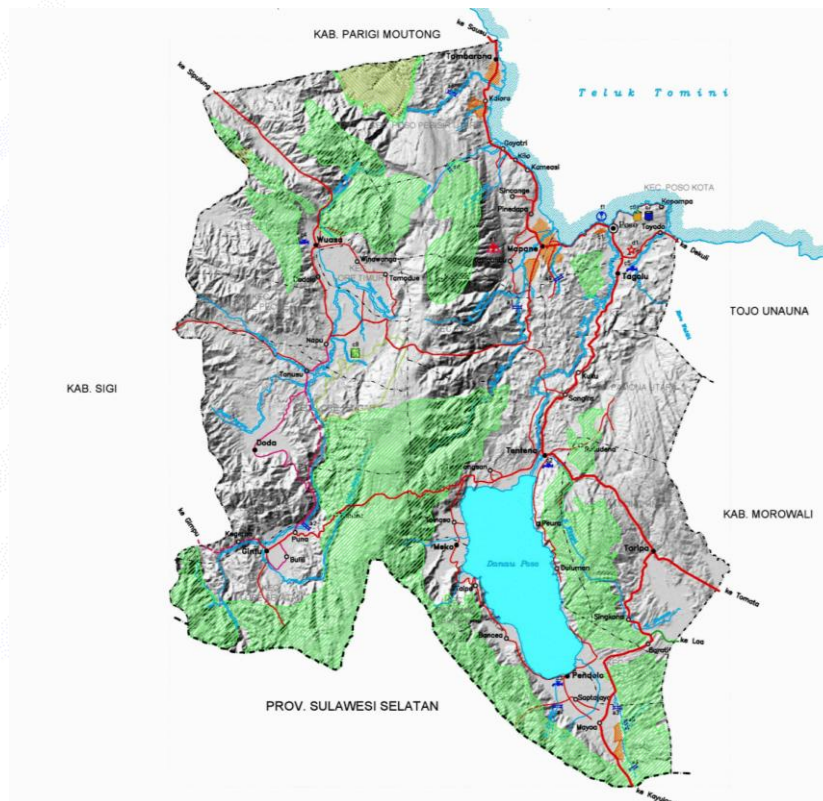
Dilihat dari sisi astronomis Kabupaten Poso, terletak pada posisi $120^{\circ}05'96''$ - $120^{\circ}52'4,8''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}06'44,892''$ - $2^{\circ}12'53,172''$ Lintang Selatan, dengan luas daratan kurang lebih 7.112,25 Km². Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Poso memiliki batas wilayah masing-masing sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara,

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.



Gambar 1 Peta Kabupaten Poso

Deretan pegunungan masing-masing Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian Tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di bagian Timur Laut, turut mengelilingi letak Kabupaten Poso, sehingga menambah kekayaan hayati dan sumberdaya alam daerah ini.

2.3 Demografi

Kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki dinamika kependudukan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Poso pada tahun 2024 mencapai sekitar 0,253 juta jiwa atau sekitar 253 ribu jiwa. Jumlah ini relatif stagnan dibandingkan tahun

sebelumnya, yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung melambat.


Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Poso pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,47 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,73 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan penduduk yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, migrasi, serta kebijakan pengendalian penduduk.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Poso Menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
Pamona Selatan	22.152	0,75
Pamona Barat	10.425	-0,02
Pamona Tenggara	7.986	-0,29
Lore Selatan	6.975	0,36
Lore Barat	3.351	1,06
Pamona Pusalemba	19.865	0,27
Pamona Timur	12.946	0,66
Pamona Utara	15.019	0,70
Lore Utara	16.317	1,28
Lore Tengah	5.425	2,10
Lore Timur	7.363	2,44
Lore Peore	4.372	2,30
Poso Pesisir	23.695	0,82
Poso Pesisir Selatan	9.937	-0,35
Poso Pesisir Utara	17.807	0,03
Lage	22.123	0,53
Poso Kota	24.025	-0,17
Poso Kota Utara	13.544	0,33
Poso Kota Selatan	10.023	-1,03
Kabupaten Poso	253.350	0,47

Sumber : BPS Kab. Poso

Dari aspek kualitas hidup, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Poso terus mengalami peningkatan, yaitu mencapai 73,02 tahun pada tahun



2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Poso menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sekitar 0,040 juta jiwa atau 40 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 14,23 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,16 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun masih memerlukan perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, yaitu sekitar 1,67 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja tetap menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong tinggi, yaitu mencapai lebih dari 98 persen, yang menunjukkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.

Secara umum, kondisi demografi Kabupaten Poso menunjukkan karakteristik sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk yang moderat, tingkat partisipasi kerja yang tinggi, serta perbaikan bertahap dalam indikator kesejahteraan masyarakat.

2.4 Pemerintahan

Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso terdapat 6 Kecamatan yang mempunyai pemerintahan kelurahan yaitu Kecamatan Pamona Utara 3 kelurahan, Pamona Puselemba 3 kelurahan, Poso Pesisir 3 kelurahan. Khusus Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Selatan dan Poso Kota Utara secara keseluruhan terdiri dari pemerintah kelurahan tanpa ada pemerintah Desa, sehingga secara keseluruhan jumlah pemerintah Desa 142 Desa dan

kelurahan 28 kelurahan, Total menjadi 170 Desa dan kelurahan Selanjutnya dalam pemerintahan wilayah peran dan sinergitas berbagai pihak baik eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sangat diperlukan.

2.5 Perekonomian

PDRB Kabupaten Poso menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, dari Rp9,21 triliun menjadi Rp12,74 triliun. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil.

Tabel 2 PDRB Kabupaten Poso Menurut Pengeluaran (ADHB) 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	5.537,99	5.757,10	6.226,46	6.857,21	7.468,82
Konsumsi LNPRT	149,56	159,97	185,85	209,78	241,41
Konsumsi Pemerintah	1.810,00	2.038,55	2.107,35	2.226,67	2.401,45
PMTB (Investasi)	4.029,00	4.432,35	4.953,33	5.290,84	5.576,15
Perubahan Inventori	49,31	55,56	62,40	61,04	67,71
Net Ekspor	4.796,72	5.035,67	5.395,96	6.016,24	6.735,59
PDRB	9.214,47	9.931,43	10.891,35	11.711,52	12.738,41

Sumber : BPS Kab. Poso

Dari sisi struktur pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dan terus meningkat setiap tahun, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditopang oleh daya beli masyarakat. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan signifikan, yang menunjukkan adanya pertumbuhan investasi sebagai faktor pendorong ekonomi jangka panjang.

Komponen net ekspor yang relatif besar juga mengindikasikan adanya kontribusi sektor produksi daerah terhadap pasar luar wilayah.

Struktur ekonomi Kabupaten Poso masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih berbasis pada sektor primer dan pemanfaatan sumber daya alam. Sektor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi menempati posisi berikutnya, yang mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi sekunder dan tersier. Namun demikian, kontribusi industri pengolahan masih relatif kecil, yang menunjukkan bahwa hilirisasi produk belum berkembang optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya transformasi ekonomi ke arah peningkatan nilai tambah melalui penguatan sektor industri dan jasa.

Tabel 3 Perkembangan Sarana Perdagangan

Jenis	2021	2022	2023	2024
Pasar	8	8	8	8
Toko	425	425	435	442
Kios	453	435	441	455
Warung	219	219	225	232
Total	1.105	1.087	1.109	1.137

Sumber : BPS Kab. Poso

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Poso menunjukkan tren peningkatan, terutama pada jenis toko, kios, dan warung. Total sarana perdagangan meningkat dari 1.105 unit pada tahun 2021 menjadi 1.137 unit pada tahun 2024.

Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta berkembangnya sektor perdagangan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Stabilitasnya jumlah pasar juga menunjukkan bahwa infrastruktur perdagangan dasar telah tersedia, namun pengembangan kualitas dan distribusinya masih diperlukan.

2.6 Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Poso menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang tercermin dari peningkatan indikator kualitas hidup penduduk. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup yang mencapai sekitar 73,02 tahun pada tahun 2024, sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Poso juga dapat dilihat dari indikator pendidikan. Secara umum, akses terhadap layanan pendidikan terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan oleh semakin luasnya ketersediaan sarana pendidikan di berbagai wilayah.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah perdesaan dan wilayah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan akses dan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Poso menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup serta membaiknya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

2.7 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Poso

Dinamika kemiskinan di Kabupaten Poso selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Kondisi kemiskinan kabupaten poso

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Miskin (ribu)	Persentase (%)
2021	530.022	41,99	15,92
2022	561.245	40,78	15,18
2023	599.881	41,48	15,16
2024	620.267	39,63	14,23



2025	632.147	36,49	12,90
-------------	---------	-------	-------

Sumber : BPS Kab. Poso


Data kemiskinan Kabupaten Poso menunjukkan dinamika yang cukup menarik dalam lima tahun terakhir. Secara umum, terlihat adanya tren penurunan tingkat kemiskinan, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,92 persen dengan jumlah 41,99 ribu jiwa. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 15,18 persen (40,78 ribu jiwa), yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat pasca tekanan sebelumnya.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 41,48 ribu jiwa, meskipun secara persentase masih mengalami penurunan tipis menjadi 15,16 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang tercermin dari meningkatnya garis kemiskinan.

Memasuki tahun 2024 hingga 2025, kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan yang lebih signifikan. Persentase penduduk miskin turun dari 14,23 persen pada tahun 2024 menjadi 12,90 persen pada tahun 2025, disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 39,63 ribu jiwa menjadi 36,49 ribu jiwa. Penurunan ini mencerminkan adanya dampak positif dari berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial yang mulai berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari Rp530.022 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp632.147 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan biaya hidup masyarakat, baik akibat inflasi maupun perubahan pola konsumsi. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan di tengah meningkatnya garis





kemiskinan dapat diartikan sebagai indikator yang cukup kuat bahwa daya beli dan pendapatan masyarakat secara umum mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso mulai menunjukkan hasil yang positif dan semakin efektif. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan penurunan kemiskinan serta mengurangi kerentanan kelompok masyarakat yang masih berada di sekitar garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB III


HASIL EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

3.1 Evaluasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pada dasarnya harus disandarkan pada suatu pendekatan sistem. Sistem tersebut terdiri atas berbagai sub-sistem (unsur) yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menentukan capaian kinerja. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal atau tidak tersedia secara memadai, maka akan berdampak pada kinerja sistem secara keseluruhan. Demikian halnya dalam penanggulangan kemiskinan, yang merupakan suatu kinerja sistem yang dipengaruhi oleh berbagai unsur, antara lain kelembagaan pelaksana, kerangka regulasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim ini terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. TKPK memiliki tugas utama dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Poso telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Poso Nomor NOMOR : 188.45/053/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2030. Tim ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkompeten dalam pelaksanaan



penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso, sehingga diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor.


Salah satu tugas pokok TKPKD Kabupaten Poso adalah melaksanakan fungsi koordinasi secara terpadu. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut, rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan secara berkala setiap triwulan. Rapat koordinasi tersebut antara lain membahas:

1. Kinerja internal TKPKD Kabupaten Poso;
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Sinkronisasi dan integrasi data dari berbagai sumber, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), TNP2K, Dinas Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT);
5. Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

Selain itu, pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Poso pada tahun 2024 juga mencakup kegiatan lintas tingkat pemerintahan, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan, baik unsur perangkat daerah maupun non-perangkat daerah, dalam rangka penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penguatan kapasitas Tim Teknis TKPKD, khususnya dalam analisis data dan pengelolaan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi tersebut, TKPKD Kabupaten Poso masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu kendala utama



adalah belum terintegrasinya data kemiskinan secara optimal, yang ditandai dengan adanya berbagai versi data dari berbagai sumber yang belum sepenuhnya selaras. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan upaya penguatan sistem data terpadu yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Poso melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kegiatan ini dilakukan baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun melalui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seluruh hasil pelaksanaan tersebut selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam forum rapat koordinasi TKPKD sebagai bagian dari upaya pengendalian dan perbaikan kinerja program.

Pada tahun 2025, TKPKD Kabupaten Poso melalui tim teknis yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini mencakup pemutakhiran data kemiskinan pada 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Poso, sebagai upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mutakhir dalam mendukung perumusan kebijakan.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi TKPKD Kabupaten Poso dan selanjutnya dilakukan pengkajian bersama dengan berbagai OPD terkait. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, diperoleh sejumlah rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Rekomendasi tersebut secara umum menekankan pentingnya peningkatan fokus program dan kegiatan pada kelompok sasaran masyarakat miskin, melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso.

Tabel 5 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025


STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Pendapatan	7,052,755,725.00	7,025,477,446.00	99.61
Mengurangi Beban Pengeluaran	87,076,675,993.57	71,966,226,306.00	82.65
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	47,155,959,751.00	46,557,140,411.00	98.73
TOTAL	141,285,391,469.57	125,548,844,163.00	88.86

Sumber : Sisitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Berdasarkan data pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2025, secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat capaian total sebesar 88,86 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp141,29 miliar, dengan realisasi mencapai Rp125,55 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan telah terlaksana dengan cukup optimal.

Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian realisasi sebesar 99,61 persen dari total anggaran Rp7,05 miliar. Tingginya capaian ini mencerminkan bahwa program-program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha produktif, telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya, strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp87,08 miliar, dengan realisasi



sebesar Rp71,97 miliar atau capaian 82,65 persen. Meskipun capaian ini tergolong cukup baik, namun masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti bantuan sosial atau subsidi, yang perlu dievaluasi lebih lanjut agar ke depan dapat lebih tepat sasaran dan optimal dalam pelaksanaannya.

Adapun strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan menunjukkan capaian yang tinggi, yaitu sebesar 98,73 persen dari total anggaran Rp47,16 miliar. Tingginya realisasi ini menunjukkan bahwa intervensi pembangunan berbasis wilayah, khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada optimalisasi penyerapan anggaran pada strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar capaian program penanggulangan kemiskinan dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Poso Tahun 2023 dilaksanakan pada melalui (1) Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, (2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan (3) Penurunan Jumlah Kantong-kantong kemiskinan. Hal ini dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang tergabung Dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Poso.

4.2 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Adapun anggaran Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2026 adalah sebagai berikut :


Tabel 6 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

KEMISKINAN	Langsung	Tidak Langsung	Penunjang	SUB TOTAL
Mengurangi Beban Pengeluaran	5,118,602,975	265,474,785,512	48,911,754,191	319,505,142,678
Meningkatkan Pendapatan	785,600,507	3,364,171,651	8,538,167,835	12,687,939,993
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,948,859,540	58,479,664,180	3,092,743,925	63,521,267,645
SUB TOTAL	7,853,063,022	327,318,621,343	60,542,665,951	395,714,350,316

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Berdasarkan klasifikasi anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Poso, terlihat bahwa intervensi program dan kegiatan dikelompokkan ke dalam belanja langsung, tidak langsung, dan penunjang dengan total anggaran mencapai **Rp395,71 miliar**. Komposisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun melalui dukungan program lintas sektor.

Strategi **mengurangi beban pengeluaran masyarakat** merupakan komponen dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu mencapai **Rp319,51**



miliar. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar berada pada belanja tidak langsung sebesar Rp265,47 miliar, diikuti belanja penunjang sebesar Rp48,91 miliar, dan belanja langsung sebesar Rp5,12 miliar. Dominasi belanja tidak langsung pada strategi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah lebih banyak diarahkan pada program bantuan sosial, subsidi, serta kebijakan yang secara tidak langsung mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Sementara itu, strategi **meminimalkan wilayah kantong kemiskinan** memiliki total anggaran sebesar **Rp63,52 miliar**, dengan porsi terbesar juga berada pada belanja tidak langsung sebesar Rp58,48 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan wilayah, seperti peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik di daerah kantong kemiskinan, menjadi fokus utama dalam strategi ini. Adapun belanja langsung dan penunjang masing-masing berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program secara teknis dan operasional.

Di sisi lain, strategi **meningkatkan pendapatan masyarakat** memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp12,69 miliar**, yang terdiri atas belanja langsung Rp785,60 juta, belanja tidak langsung Rp3,36 miliar, dan belanja penunjang Rp8,54 miliar. Meskipun alokasinya relatif lebih kecil dibandingkan strategi lainnya, program pada strategi ini memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas.

Secara keseluruhan, struktur anggaran ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso masih didominasi oleh pendekatan **pengurangan beban pengeluaran** melalui belanja tidak langsung. Oleh karena itu, ke depan diperlukan keseimbangan dalam pengalokasian anggaran, khususnya dengan memperkuat strategi peningkatan pendapatan masyarakat agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.



|



BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

5.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026


Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Poso Tahun 2026 diarahkan pada upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemerataan pembangunan wilayah, khususnya pada daerah kantong kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Selain itu, pengembangan sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi prioritas dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga diarahkan melalui pendekatan terpadu dan berbasis data, dengan memperkuat sinergi antar perangkat daerah serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial.

5.2 Permasalahan Kemiskinan

Meskipun menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Poso masih tergolong cukup tinggi dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi bersifat multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.



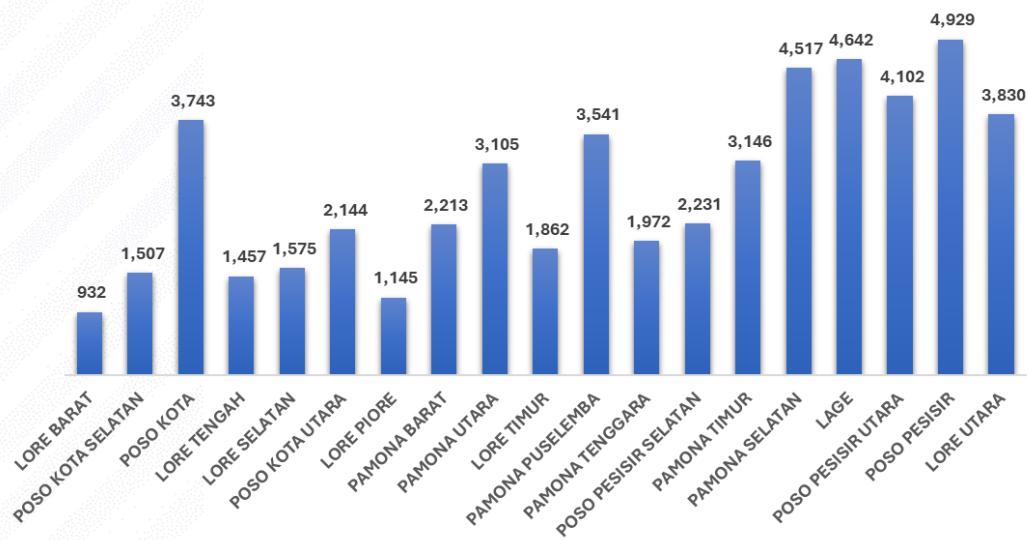
Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi produktif, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertentu. Selain itu, masih terdapat ketimpangan antar wilayah, khususnya pada daerah kantong kemiskinan yang membutuhkan intervensi lebih intensif.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan data kemiskinan, yang ditandai dengan adanya perbedaan data antar sumber. Kondisi ini berdampak pada kurang tepatnya penetapan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan terarah.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso.

5.2.1 Sebaran Penduduk Berpenghasilan Rendah

Berdasarkan data sebaran penduduk berpenghasilan rendah di Kabupaten Poso, jumlah keluarga yang tergolong berpenghasilan rendah tercatat sebanyak **52.593 keluarga** yang tersebar di seluruh kecamatan. Distribusi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Poso bersifat menyebar, namun dengan konsentrasi yang berbeda-beda antar wilayah.




Gambar 2 Sebaran Penduduk Berpenghasilan Rendah (DTSEN)

Kecamatan dengan jumlah keluarga berpenghasilan rendah tertinggi terdapat di **Poso Pesisir** sebanyak 4.929 keluarga, diikuti oleh **Lage** sebanyak 4.642 keluarga, serta **Pamona Selatan** sebanyak 4.517 keluarga. Selain itu, kecamatan lain dengan jumlah yang relatif tinggi antara lain **Poso Pesisir Utara** (4.102 keluarga), **Lore Utara** (3.830 keluarga), **Poso Kota** (3.743 keluarga), dan **Pamona Pusalemba** (3.541 keluarga). Tingginya jumlah keluarga berpenghasilan rendah di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang relatif lebih rendah, seperti **Lore Barat** (932 keluarga), **Lore Peore** (1.145 keluarga), serta **Lore Tengah** (1.457 keluarga). Meskipun jumlahnya lebih kecil, wilayah-wilayah ini tetap memerlukan intervensi yang tepat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Secara spasial, sebaran ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir dan beberapa kawasan perkotaan memiliki jumlah keluarga berpenghasilan



rendah yang cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya tekanan ekonomi baik dari sisi keterbatasan lapangan kerja maupun tingginya biaya hidup. Sementara itu, wilayah pedalaman seperti kawasan Lore juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait keterbatasan akses dan infrastruktur.


Dengan demikian, pola sebaran ini menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis wilayah (spasial) dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Intervensi kebijakan perlu diarahkan secara lebih fokus pada wilayah dengan konsentrasi tinggi, tanpa mengabaikan wilayah lainnya, guna memastikan penanganan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan di Kabupaten Poso.

5.2.2 Permasalahan Kemiskinan Sektor Pendidikan

Permasalahan kemiskinan di sektor pendidikan di Kabupaten Poso masih menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin, berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai.

Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya keterbatasan akses pendidikan, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum meratanya distribusi tenaga pendidik menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan secara optimal.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi kendala signifikan. Meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah dilaksanakan, seperti bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah, masih terdapat anak-anak dari keluarga miskin yang berisiko putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang mendorong anak untuk membantu orang tua bekerja,



serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan nonformal seperti transportasi dan biaya penunjang lainnya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas pendidikan, yang ditandai dengan keterbatasan fasilitas belajar, kualitas tenaga pendidik, serta belum optimalnya proses pembelajaran. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.


Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pendidikan belum merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan dan infrastruktur. Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan akses terhadap sumber belajar yang berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih terarah dan terintegrasi dalam meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin. Hal ini menjadi penting dalam rangka memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Poso secara berkelanjutan.

5.2.3 Permasalahan Kemiskinan Sektor Kesehatan

Permasalahan kemiskinan di sektor kesehatan di Kabupaten Poso masih menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin, berdampak pada rendahnya derajat kesehatan serta meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit.

Salah satu permasalahan utama adalah belum meratanya akses pelayanan kesehatan, terutama di wilayah perdesaan, terpencil, dan sulit dijangkau. Keterbatasan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta sarana penunjang layanan kesehatan menyebabkan masyarakat miskin belum sepenuhnya memperoleh pelayanan yang optimal. Kondisi



geografis yang cukup menantang juga menjadi faktor penghambat dalam menjangkau layanan kesehatan secara cepat dan tepat.

Selain itu, kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas turut mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan. Meskipun telah tersedia berbagai program jaminan kesehatan, masih terdapat masyarakat miskin yang belum terakomodasi secara optimal atau mengalami kendala dalam pemanfaatannya, seperti keterbatasan informasi, administrasi, maupun akses transportasi menuju fasilitas kesehatan.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih tingginya angka kasus gizi kurang dan stunting pada balita, yang berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, pola asuh, serta akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan masyarakat tidak hanya memerlukan intervensi medis, tetapi juga pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Di samping itu, kualitas layanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten maupun kelengkapan fasilitas dan peralatan medis. Kesenjangan kualitas layanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin. Penguatan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, serta intervensi berbasis keluarga dan masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan penanggulangan

5.2.4 Permasalahan Kemiskinan Sektor Ketenagakerjaan


Permasalahan kemiskinan di sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Poso berkaitan erat dengan keterbatasan kesempatan kerja yang produktif serta rendahnya kualitas tenaga kerja. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan masyarakat, khususnya kelompok miskin, dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai.

Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya lapangan kerja formal di daerah. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional menyebabkan sebagian besar tenaga kerja terserap pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah pekerja rentan miskin (*working poor*) yang meskipun bekerja, namun belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia tenaga kerja masih menjadi tantangan. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah menyebabkan daya saing tenaga kerja lokal belum optimal, sehingga sulit bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan juga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya keterkaitan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Lulusan pendidikan seringkali belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga berpotensi menimbulkan pengangguran terselubung maupun setengah menganggur.

Di sisi lain, akses terhadap peluang usaha dan permodalan bagi masyarakat miskin juga masih terbatas. Hal ini menghambat pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dukungan



terhadap kewirausahaan, termasuk pendampingan usaha dan akses pasar, masih perlu diperkuat.


Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam pengembangan ketenagakerjaan, antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penguatan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan kewirausahaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso.

5.2.5 Permasalahan Kemiskinan Sektor Infrastruktur

Permasalahan kemiskinan di sektor infrastruktur di Kabupaten Poso masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai berdampak langsung pada kondisi kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap **sanitasi layak**. Sebagian rumah tangga, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil, masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan penyakit lainnya, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan.

Selain itu, akses terhadap **air minum layak** juga masih menjadi tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap sumber air bersih yang aman dan berkelanjutan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan atau menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh air bersih, sehingga meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga miskin.



Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah masih adanya **rumah tidak layak huni (RTLH)**. Sebagian masyarakat miskin masih tinggal di rumah dengan kondisi fisik yang tidak memenuhi standar kelayakan, seperti struktur bangunan yang tidak aman, ventilasi yang kurang memadai, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. Kondisi perumahan yang tidak layak ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Di samping itu, keterbatasan infrastruktur dasar lainnya seperti jalan lingkungan, drainase, dan akses listrik di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan ini menghambat mobilitas, akses terhadap layanan dasar, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya yang menyangkut masyarakat miskin. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak, air minum aman, serta perbaikan rumah tidak layak huni menjadi prioritas penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso.

5.3 Program Prioritas

Program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran, serta penanganan wilayah kantong kemiskinan. Program-program tersebut dirancang secara terpadu dan berorientasi pada hasil, dengan menitikberatkan pada kelompok sasaran masyarakat miskin dan rentan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, program prioritas difokuskan pada pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan sektor

pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal. Sementara itu, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pemerintah daerah memprioritaskan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, dalam upaya meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, program prioritas diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas permukiman, serta pengembangan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi lintas sektor untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program prioritas penanggulangan kemiskinan Tahun 2026 diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Poso.

5.4 Sasaran Pelaksanaan Program

5.4.1 Sasaran Prioritas Akses Air Minum Layak

Kebutuhan akses air minum layak di Kabupaten Poso menunjukkan pola sebaran yang cukup luas dengan tingkat kebutuhan yang bervariasi antar kecamatan.

Kecamatan	Jumlah (KK)
Lore Selatan	509
Pamona Pusalemba	383
Lore Utara	373
Poso Pesisir Utara	341
Poso Pesisir	337
Lage	318

Kecamatan	Jumlah (KK)
Pamona Selatan	291
Pamona Utara	290
Lore Barat	301
Lore Tengah	203
Lore Timur	166
Poso Kota Selatan	180
Poso Kota Utara	106
Poso Kota	101
Lore Piore	104
Pamona Barat	98
Pamona Tenggara	77
Poso Pesisir Selatan	76
Pamona Timur	67

Sumber : DTSEN (diolah Kembali)

Kecamatan **Lore Selatan** mencatat kebutuhan tertinggi sebesar 509 unit, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut masih belum memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan. Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan **Pamona Pusalemba** (383 unit) dan **Lore Utara** (373 unit), yang memperlihatkan bahwa kawasan pedalaman, khususnya wilayah Lore, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar air bersih.

Di wilayah pesisir, seperti **Poso Pesisir Utara** (341 unit) dan **Poso Pesisir** (337 unit), kebutuhan yang tinggi menunjukkan adanya permasalahan ketersediaan air bersih yang dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti kualitas air tanah yang kurang layak konsumsi serta keterbatasan sumber air baku. Sementara itu, wilayah dengan karakteristik semi-perkotaan seperti **Lage** (318 unit) dan **Pamona Selatan** (291 unit) juga menunjukkan angka kebutuhan yang cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk

belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan infrastruktur air minum yang memadai.

Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan akses air minum tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda, seperti pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis perpipaan di wilayah padat penduduk, serta sistem berbasis masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir.

5.4.2 Sasaran Prioritas Akses Sanitasi Layak

Permasalahan sanitasi layak di Kabupaten Poso masih cukup kompleks.

Tabel 8 Sasaran Prioritas Akses Sanitasi Layak

Kecamatan	Jumlah
Lore Utara	372
Poso Pesisir Utara	295
Poso Pesisir	278
Lage	234
Pamona Timur	139
Lore Timur	122
Lore Tengah	111
Pamona Selatan	91
Poso Kota Utara	84
Pamona Utara	76
Poso Kota	73
Pamona Tenggara	69
Pamona Pusalemba	64
Pamona Barat	58
Lore Piore	51
Lore Selatan	41

Kecamatan	Jumlah
Poso Pesisir Selatan	41
Poso Kota Selatan	23
Lore Barat	16

Sumber : DTSEN (diolah Kembali)

Konsentrasi kebutuhan tertinggi di Kecamatan **Lore Utara** sebesar 372 unit. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, seperti jamban sehat dan sistem pengelolaan limbah domestik yang memadai.

Wilayah pesisir seperti **Poso Pesisir Utara** (295 unit) dan **Poso Pesisir** (278 unit) juga menunjukkan kebutuhan yang tinggi, yang mengindikasikan adanya praktik sanitasi yang belum layak, seperti pembuangan limbah langsung ke lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, terutama meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan.

Kecamatan **Lage** (234 unit) sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk relatif tinggi juga menunjukkan kebutuhan sanitasi yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan sanitasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga oleh tingkat kepadatan penduduk dan perilaku masyarakat.

Selain itu, wilayah-wilayah seperti **Pamona Timur**, **Lore Timur**, dan **Lore Tengah** juga menunjukkan angka kebutuhan yang cukup tinggi, yang memperlihatkan bahwa masalah sanitasi masih menjadi isu lintas wilayah. Oleh karena itu, intervensi yang diperlukan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

5.4.3 Sasaran Prioritas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Poso menunjukkan distribusi yang relatif tersebar.

Tabel 9 Sasaran Prioritas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kecamatan	Jumlah
Lage	61
Poso Pesisir Utara	40
Lore Barat	33
Pamona Pusalemba	26
Lore Selatan	25
Poso Pesisir	24
Pamona Tenggara	22
Pamona Utara	21
Pamona Selatan	20
Pamona Timur	14
Lore Utara	13
Lore Tengah	13
Poso Kota Selatan	12
Poso Kota Utara	9
Poso Pesisir Selatan	9
Poso Kota	9
Lore Timur	6
Pamona Barat	4
Lore Piore	1

Sumber : DTSEN (diolah Kembali)

Konsentrasi tertinggi di Kecamatan **Lage** sebesar 61 unit. Tingginya kebutuhan di wilayah ini mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang tinggal dalam kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan, baik

dari aspek struktur bangunan, ventilasi, maupun akses terhadap fasilitas dasar.

Kecamatan **Poso Pesisir Utara** (40 unit) dan **Lore Barat** (33 unit) juga menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan perumahan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan atau pesisir, tetapi juga di wilayah pedalaman. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, serta minimnya akses terhadap program bantuan perumahan.

Wilayah lain seperti **Pamona Pusalemba**, **Lore Selatan**, dan **Poso Pesisir** juga memiliki jumlah RTLH yang cukup tinggi, yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih merata. Meskipun jumlah RTLH di beberapa kecamatan relatif kecil, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Penanganan RTLH perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui bantuan perbaikan rumah, tetapi juga dikaitkan dengan peningkatan akses sanitasi, air minum, dan lingkungan permukiman yang sehat.

5.4.4 Sasaran Prioritas Akses Penerangan

Akses terhadap penerangan, khususnya listrik, masih menjadi salah satu permasalahan infrastruktur dasar di Kabupaten Poso.

Tabel 10 Sasaran Prioritas Akses Penerangan

Kecamatan	Jumlah
Lore Utara	228
Poso Pesisir Utara	158
Poso Pesisir	138
Lore Tengah	125
Lore Timur	102
Lage	95
Pamona Timur	85

Kecamatan	Jumlah
Lore Selatan	83
Pamona Selatan	77
Poso Pesisir Selatan	57
Pamona Barat	50
Pamona Tenggara	49
Poso Kota	47
Lore Piore	43
Pamona Utara	41
Pamona Pusalemba	31
Lore Barat	26
Poso Kota Selatan	23
Poso Kota Utara	61


Sumber : DTSEN (diolah Kembali)

Kecamatan **Lore Utara** mencatat kebutuhan tertinggi sebesar 228 unit, yang menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.

Wilayah pesisir seperti **Poso Pesisir Utara** (158 unit) dan **Poso Pesisir** (138 unit) juga menunjukkan kebutuhan yang cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jaringan listrik serta kondisi geografis yang menyulitkan distribusi energi listrik ke wilayah-wilayah tertentu.

Kecamatan **Lore Tengah** (125 unit) dan **Lore Timur** (102 unit) memperlihatkan bahwa wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses penerangan yang cukup serius. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada malam hari, serta menghambat akses pendidikan bagi anak-anak.

Selain itu, wilayah seperti **Lage**, **Pamona Timur**, dan **Lore Selatan** juga menunjukkan kebutuhan yang cukup signifikan, yang mengindikasikan bahwa akses listrik belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya



percepatan elektrifikasi, baik melalui perluasan jaringan listrik maupun pemanfaatan energi alternatif di wilayah yang sulit dijangkau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Catatan Penutup

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Poso Tahun 2026 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat gambaran kondisi kemiskinan, permasalahan yang dihadapi, serta arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Berbagai analisis yang telah disusun menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Poso bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan, dan penerangan. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam aspek kelembagaan dan integrasi data yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi ini sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada hasil menjadi kunci dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi, sehingga mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Poso Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Data Kemiskinan

Perlu dilakukan integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala untuk memastikan keselarasan data antar perangkat daerah dan lembaga terkait, sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

Diperlukan penguatan koordinasi antar OPD serta pemangku kepentingan lainnya melalui peran aktif TKPKD, guna memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

3. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar

Intervensi perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, dan penerangan, khususnya di wilayah kantong kemiskinan.

4. Penguatan Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah.

5. Pendekatan Berbasis Wilayah (Spasial)

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah, dengan memprioritaskan kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur dasar yang tinggi.

6. **Peningkatan Efektivitas Program Perlindungan Sosial**

Program bantuan sosial perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin secara optimal, serta disinergikan dengan program pemberdayaan.

7. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi**

Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mengukur capaian program serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan.

8. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha**

Pelibatan masyarakat dan dunia usaha perlu diperkuat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, baik melalui kemitraan, pemberdayaan, maupun tanggung jawab sosial.

LAMPIRAN

RINCIAN SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	3,318,392,160.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran	34,240,674.00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	18,893,485,000.00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	60,000,000.00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	85,000,000.00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,923,392,800.00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,352,361,120.00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	442,044,000.00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Mengurangi Beban Pengeluaran	114,557,617.00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	652,800,000.00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	10,787,055,000.00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	48,000,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	677,000,000.00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	849,700,000.00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	3,048,599,998.00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	201,442,000.00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	45,500,000.00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	94,500,000.00
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Mengurangi Beban Pengeluaran	345,000,000.00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	833,300,000.00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Pendapatan	62,330,000.00
22	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	41,117,360,536.00
23	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	521,503,100.00
24	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	292,393,600.00
25	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	3,374,950,083.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
26	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	201,697,785.00
27	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	49,414,635.00
28	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	47,749,800.00
29	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	705,139,172.00
30	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	20,999,900.00
31	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,695,775.00
32	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	49,680,000.00
33	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	60,000,000.00
34	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	20,381,200.00
35	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	18,270,000.00
36	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,630,000.00
37	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	475,980,132.00
38	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,929,600.00
39	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,097,650.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
40	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	17,097,000.00
41	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	598,765,200.00
42	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,896,000.00
43	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,758,618,500.00
44	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	17,793,700.00
45	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	165,280,500.00
46	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,060,200.00
47	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	18,240,450.00
48	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	671,284,300.00
49	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	12,664,281,850.00
50	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Mengurangi Beban Pengeluaran	44,706,825.00
51	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Mengurangi Beban Pengeluaran	17,676,600.00
52	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,104,000.00
53	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	330,033,828.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
54	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,188,620.00
55	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,099,000.00
56	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,077,200.00
57	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Mengurangi Beban Pengeluaran	26,562,000.00
58	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mengurangi Beban Pengeluaran	129,253,100.00
59	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Mengurangi Beban Pengeluaran	142,373,000.00
60	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	28,695,000.00
61	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Meningkatkan Pendapatan	314,902,500.00
62	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	29,624,000.00
63	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Mengurangi Beban Pengeluaran	41,986,960.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
64	Dinas Kesehatan Kab. Poso	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	51,252,000.00
65	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	35,000,000.00
66	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	53,700,000.00
67	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	7,350,000.00
68	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	524,518,800.00
69	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,650,000.00
70	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,392,000.00
71	Puskesmas Kayamanya	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	135,825,000.00
72	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,348,021,501.00
73	Puskesmas Kayamanya	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	53,191,200.00
74	Puskesmas Kayamanya	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	102,250,000.00
75	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	41,400,000.00
76	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	31,650,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
77	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	10,500,000.00
78	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	117,401,000.00
79	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,800,000.00
80	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	17,100,000.00
81	Puskesmas Lawanga	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	145,200,000.00
82	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	756,636,218.00
83	Puskesmas Lawanga	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	35,562,000.00
84	Puskesmas Lawanga	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	66,330,000.00
85	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	28,800,000.00
86	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,950,000.00
87	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	33,525,000.00
88	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	98,885,000.00
89	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	31,275,000.00
90	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	37,575,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
91	Puskesmas Kawua	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	117,150,000.00
92	Puskesmas Kawua	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	823,181,280.00
93	Puskesmas Kawua	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	30,458,000.00
94	Puskesmas Kawua	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	48,350,000.00
95	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	56,412,000.00
96	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	38,250,000.00
97	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	39,600,000.00
98	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	208,100,000.00
99	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	34,650,000.00
100	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	52,950,000.00
101	Puskesmas Tagolu	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	185,400,000.00
102	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,033,516,741.00
103	Puskesmas Tagolu	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	35,250,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
104	Puskesmas Tagolu	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	58,125,000.00
105	Puskesmas Malei	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	31,680,000.00
106	Puskesmas Malei	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	42,900,000.00
107	Puskesmas Malei	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	13,500,000.00
108	Puskesmas Malei	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	228,523,000.00
109	Puskesmas Malei	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	11,700,000.00
110	Puskesmas Malei	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	68,700,000.00
111	Puskesmas Malei	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	121,200,000.00
112	Puskesmas Malei	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	590,163,919.00
113	Puskesmas Malei	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	37,497,000.00
114	Puskesmas Malei	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	46,970,000.00
115	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	51,890,000.00
116	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	36,000,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
117	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	16,200,000.00
118	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	149,659,000.00
119	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,100,000.00
120	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	33,750,000.00
121	Puskesmas Tentena	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	92,925,000.00
122	Puskesmas Tentena	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,315,935,156.00
123	Puskesmas Tentena	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	48,608,000.00
124	Puskesmas Tentena	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	18,300,000.00
125	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	43,725,000.00
126	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	41,850,000.00
127	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,750,000.00
128	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	189,937,000.00
129	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,220,000.00
130	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	48,525,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
131	Puskesmas Sulewana	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	152,550,000.00
132	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,115,403,396.00
133	Puskesmas Sulewana	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	53,025,000.00
134	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	33,600,000.00
135	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	16,200,000.00
136	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,700,000.00
137	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	73,604,000.00
138	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,700,000.00
139	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,650,000.00
140	Puskesmas Watutau	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	101,190,000.00
141	Puskesmas Watutau	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	564,953,102.00
142	Puskesmas Watutau	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,462,000.00
143	Puskesmas Watutau	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	37,045,000.00
144	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	23,240,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
145	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,500,000.00
146	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	8,400,000.00
147	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	117,355,000.00
148	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	12,600,000.00
149	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	21,450,000.00
150	Puskesmas Pendolo	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	149,025,000.00
151	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	967,444,650.00
152	Puskesmas Pendolo	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	32,422,000.00
153	Puskesmas Pendolo	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	26,975,000.00
154	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	72,000,000.00
155	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	127,050,000.00
156	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,400,000.00
157	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	376,079,000.00
158	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	11,550,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
159	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	27,900,000.00
160	Puskesmas Tambarana	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	213,900,000.00
161	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,599,629,690.00
162	Puskesmas Tambarana	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	55,226,000.00
163	Puskesmas Tambarana	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	28,960,000.00
164	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	61,880,000.00
165	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	39,042,000.00
166	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	33,300,000.00
167	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	131,696,000.00
168	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,400,000.00
169	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	18,825,000.00
170	Puskesmas Korobono	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	149,790,000.00
171	Puskesmas Korobono	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	619,368,434.00
172	Puskesmas Korobono	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	41,865,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
173	Puskesmas Korobono	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	17,100,000.00
174	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	76,800,000.00
175	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	64,650,000.00
176	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	15,000,000.00
177	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	170,108,000.00
178	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	16,500,000.00
179	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	29,190,000.00
180	Puskesmas Tangkura	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	130,200,000.00
181	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	567,469,592.00
182	Puskesmas Tangkura	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	36,762,000.00
183	Puskesmas Tangkura	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	47,760,000.00
184	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	72,600,000.00
185	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	55,950,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
186	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	42,300,000.00
187	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	217,224,000.00
188	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	9,000,000.00
189	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	30,000,000.00
190	Puskesmas Mapane	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	138,300,000.00
191	Puskesmas Mapane	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,690,180,430.00
192	Puskesmas Mapane	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	42,795,000.00
193	Puskesmas Mapane	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	31,320,000.00
194	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	20,160,000.00
195	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	13,200,000.00
196	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	10,800,000.00
197	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	90,416,000.00
198	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	7,200,000.00
199	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	10,350,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
200	Puskesmas Lengkeka	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	49,500,000.00
201	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	343,628,164.00
202	Puskesmas Lengkeka	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	35,602,000.00
203	Puskesmas Lengkeka	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,795,000.00
204	Puskesmas Meko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	62,400,000.00
205	Puskesmas Meko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,350,000.00
206	Puskesmas Meko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	9,000,000.00
207	Puskesmas Meko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	117,479,000.00
208	Puskesmas Meko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	7,200,000.00
209	Puskesmas Meko	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	18,000,000.00
210	Puskesmas Meko	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	156,525,000.00
211	Puskesmas Meko	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,164,218,200.00
212	Puskesmas Meko	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	31,812,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
213	Puskesmas Meko	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	27,720,000.00
214	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	26,500,000.00
215	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	13,500,000.00
216	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	6,000,000.00
217	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	94,220,000.00
218	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	2,250,000.00
219	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	8,700,000.00
220	Puskesmas Maholo	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	139,800,000.00
221	Puskesmas Maholo	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	700,536,151.00
222	Puskesmas Maholo	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	26,412,000.00
223	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	43,200,000.00
224	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	52,200,000.00
225	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	9,600,000.00
226	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	296,120,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
227	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,200,000.00
228	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	29,550,000.00
229	Puskesmas Wuasa	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	135,450,000.00
230	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,346,663,444.00
231	Puskesmas Wuasa	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	41,112,000.00
232	Puskesmas Wuasa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	51,675,000.00
233	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	32,100,000.00
234	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	28,972,000.00
235	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	16,800,000.00
236	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	163,295,000.00
237	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	6,600,000.00
238	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	40,200,000.00
239	Puskesmas Tonusu	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	253,575,000.00
240	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	463,810,986.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
241	Puskesmas Tonusu	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	30,000,000.00
242	Puskesmas Tonusu	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	59,475,000.00
243	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	44,000,000.00
244	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	38,175,000.00
245	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	12,000,000.00
246	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	152,954,000.00
247	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	10,800,000.00
248	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,500,000.00
249	Puskesmas Tokorondo	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	118,200,000.00
250	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	497,041,337.00
251	Puskesmas Tokorondo	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	26,387,000.00
252	Puskesmas Tokorondo	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	44,733,000.00
253	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	62,437,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
254	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	55,800,000.00
255	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	8,400,000.00
256	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	148,289,000.00
257	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,350,000.00
258	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	28,500,000.00
259	Puskesmas Taripa	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	165,300,000.00
260	Puskesmas Taripa	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	977,912,399.00
261	Puskesmas Taripa	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	46,400,000.00
262	Puskesmas Taripa	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	40,180,000.00
263	Puskesmas Mayoa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	38,550,000.00
264	Puskesmas Mayoa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	36,600,000.00
265	Puskesmas Mayoa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	50,400,000.00
266	Puskesmas Mayoa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	151,934,000.00
267	Puskesmas Mayoa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,300,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
268	Puskesmas Mayo	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	39,300,000.00
269	Puskesmas Mayo	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	134,700,000.00
270	Puskesmas Mayo	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	720,276,426.00
271	Puskesmas Mayo	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	65,712,000.00
272	Puskesmas Mayo	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	23,745,000.00
273	Puskesmas Doda	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	48,000,000.00
274	Puskesmas Doda	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	24,300,000.00
275	Puskesmas Doda	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,500,000.00
276	Puskesmas Doda	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	153,977,000.00
277	Puskesmas Doda	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	9,900,000.00
278	Puskesmas Doda	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	34,500,000.00
279	Puskesmas Doda	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	161,100,000.00
280	Puskesmas Doda	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	610,368,510.00
281	Puskesmas Doda	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	30,008,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
282	Puskesmas Doda	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	68,955,000.00
283	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	38,400,000.00
284	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	35,625,000.00
285	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,400,000.00
286	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	118,391,000.00
287	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	13,200,000.00
288	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	27,600,000.00
289	Puskesmas Gintu	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	98,475,000.00
290	Puskesmas Gintu	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	960,050,408.00
291	Puskesmas Gintu	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	23,262,000.00
292	Puskesmas Gintu	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	36,100,000.00
293	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,200,000.00
294	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,700,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
295	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	13,500,000.00
296	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	103,319,000.00
297	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	15,075,000.00
298	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	12,525,000.00
299	Puskesmas Olumokunde	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	130,665,000.00
300	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	323,401,314.00
301	Puskesmas Olumokunde	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	33,837,000.00
302	Puskesmas Olumokunde	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,655,000.00
303	RSUD Kab Poso	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1,071,212,787.00
304	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Normalisasi/Restorasi Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,189,300,000.00
305	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	981,200,000.00
306	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	229,550,000.00
307	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Pembangunan Tanggul Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,008,040,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Rehabilitasi Embung	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	473,620,000.00
309	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,532,199,000.00
310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,094,670,000.00
311	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	448,920,000.00
312	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	311,980,000.00
313	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,151,620,000.00
314	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,142,920,000.00
315	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,946,000,000.00
316	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	256,290,000.00
317	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,390,169,099.00
318	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	397,210,000.00
319	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	761,860,000.00
320	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	300,000,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
321	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Pemeliharaan Rutin Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	665,840,000.00
322	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Rehabilitasi Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	18,715,044,829.00
323	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Rekonstruksi Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,289,466,400.00
324	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Pembangunan Jembatan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2,732,820,000.00
325	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Meningkatkan Pendapatan	234,860,000.00
326	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	955,540,000.00
327	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Poso	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	60,100,000.00
328	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,990,200.00
329	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	2,580,000.00
330	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,919,317,375.00
331	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	10,417,000.00
332	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	20,031,825.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Poso	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Mengurangi Beban Pengeluaran	124,472,940.00
334	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Poso	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	238,729,682.00
335	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Poso	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	216,407,036.00
336	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Poso	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	28,957,000.00
337	Dinas Sosial Kab. Poso	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	80,430,501.00
338	Dinas Sosial Kab. Poso	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	83,583,000.00
339	Dinas Sosial Kab. Poso	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatkan Pendapatan	13,440,000.00
340	Dinas Sosial Kab. Poso	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	103,748,000.00
341	Dinas Sosial Kab. Poso	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	279,999,950.00
342	Dinas Sosial Kab. Poso	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	25,000,000.00
343	Dinas Sosial Kab. Poso	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan	47,000,000.00
344	Dinas Sosial Kab. Poso	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	75,291,424.00
345	Dinas Sosial Kab. Poso	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	60,008,501.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
346	Dinas Sosial Kab. Poso	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	38,793,000.00
347	Dinas Sosial Kab. Poso	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran	29,474,503.00
348	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Meningkatkan Pendapatan	33,694,850.00
349	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Meningkatkan Pendapatan	18,106,835.00
350	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	169,613,054.00
351	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	999,760.00
352	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	260,850.00
353	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Pelayanan antar Kerja	Meningkatkan Pendapatan	9,600,000.00
354	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Job Fair/Bursa Kerja	Meningkatkan Pendapatan	118,895.00
355	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Meningkatkan Pendapatan	544,735.00
356	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	1,777,790.00
357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Poso	Penyuluhan Transmigrasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	5,135,340.00
358	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	33,426,372.00
359	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	26,816,040.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
360	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	32,345,080.00
361	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	84,564,000.00
362	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	35,469,000.00
363	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,796,320.00
364	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	86,855,580.00
365	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	33,811,755.00
366	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	102,000,000.00
367	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	15,520,490.00
368	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Poso	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	152,076,000.00
369	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Mengurangi Beban Pengeluaran	15,031,150.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
370	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	14,881,850.00
371	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	95,183,750.00
372	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	39,065,100.00
373	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	24,201,033.00
374	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Mengurangi Beban Pengeluaran	19,606,510.00
375	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	6,643,900.00
376	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	6,811,900.00
377	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	7,326,525.00
378	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	49,636,500.00
379	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,267,888,724.00
380	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Poso	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	289,904,410.00
381	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Poso	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	22,724,654.00
382	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Poso	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatkan Pendapatan	119,999,780.00
383	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Poso	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	110,344,725.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
384	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Poso	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Mengurangi Beban Pengeluaran	370,302,534.00
385	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Poso	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Mengurangi Beban Pengeluaran	669,149,450.00
386	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Poso	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Mengurangi Beban Pengeluaran	592,408,485.00
387	Dinas Perhubungan Kab. Poso	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	3,585,272,731.00
388	Dinas Perhubungan Kab. Poso	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	103,553,170.00
389	Dinas Perhubungan Kab. Poso	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	111,810,000.00
390	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Poso	Penyusunan Konten	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	8,373,400.00
391	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Poso	Penyediaan Akses Internet	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	945,668,850.00
392	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Poso	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	33,530,140.00
393	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Poso	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	41,001,595.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
394	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Poso	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatkan Pendapatan	70,514,110.00
395	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Poso	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	52,228,130.00
396	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Poso	Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	548,186,356.00
397	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Poso	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Meningkatkan Pendapatan	18,191,385.00
398	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Poso	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Meningkatkan Pendapatan	45,061,000.00
399	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Poso	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Meningkatkan Pendapatan	27,989,000.00
400	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Poso	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Meningkatkan Pendapatan	130,448,151.00
401	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Poso	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	134,156,300.00
402	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	369,180,075.00
403	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	9,939,225.00
404	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	10,046,600.00
405	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatkan Pendapatan	129,670,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
406	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	13,739,250.00
407	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	25,689,945.00
408	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	6,285,365.00
409	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	407,086,206.00
410	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Meningkatkan Pendapatan	11,646,630.00
411	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Meningkatkan Pendapatan	125,703,000.00
412	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Poso	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	161,386,000.00
413	Dinas Pariwisata Kab. Poso	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	209,497,085.00
414	Dinas Pariwisata Kab. Poso	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	582,326,043.00
415	Dinas Pariwisata Kab. Poso	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Meningkatkan Pendapatan	37,733,238.00
416	Dinas Pariwisata Kab. Poso	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pendapatan	10,002,000.00
417	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	3,473,802,275.00
418	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Meningkatkan Pendapatan	4,331,031,692.00
419	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	6,547,737,535.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
420	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Meningkatkan Pendapatan	170,000,000.00
421	Dinas Pertanian Kab. Poso	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	69,675,900.00
422	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	98,883,000.00
423	Dinas Pertanian Kab. Poso	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	8,500,000.00
424	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	3,173,100.00
425	Dinas Pertanian Kab. Poso	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Meningkatkan Pendapatan	49,806,450.00
426	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Poso	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Meningkatkan Pendapatan	35,889,790.00
427	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Poso	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Meningkatkan Pendapatan	46,648,300.00
428	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Poso	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Meningkatkan Pendapatan	106,654,150.00
429	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Mengurangi Beban Pengeluaran	172,704,461,377.81
430	Kecamatan Poso Kota	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,352,226,994.00
431	Kecamatan Poso Kota Utara	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,400,000,000.00
432	Kecamatan Poso Kota Selatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1,000,000,000.00
433	Kecamatan Poso Kota Selatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatkan Pendapatan	55,000,000.00
434	Kecamatan Poso Kota Selatan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4,375,000.00

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
435	Kecamatan Poso Pesisir	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	600,000,000.00
436	Kecamatan Pamona Utara	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	600,005,876.00
437	Kecamatan Pamona Puselemba	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	600,000,000.00